Kerja Sama Sejak 2017

KADIS PUPR Melawi, Makarius Horong mengungkapkan, munculnya instansi Polres Melawi dalam plang proyek dinas PU sebenarnya bukan hal yang aneh. Apalagi pendampingan dari instansi kepolisian sudah berjalan selama tiga tahun terakhir.

"Kerja sama ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Jadi, proyek di luar TP4D, saya minta pendampingan dari Polres Melawi. Saya sampaikan permohonan dan disetujui oleh Kapolres," ujarnya.

Horong memaparkan, pendampingan kegiatan fisik selain oleh TP4D Kejari Sintang juga melibatkan dari Polres Melawi. Bila TP4D mengawasi proyek bernilai di atas Rp1 miliar, maka Polres mengawasi kegiatan PUPR dengan pagu di bawahnya.

"Alasannya tentu memang kan bagus kalau kegiatan kita dikawal. Sampai sekarang pendampingan masih berjalan. Setiap plang proyek dipasang juga plang TP4D serta Polres," katanya.

Dikatakan Horong, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansinya tentu akan diketahui oleh aparat penegak hukum sebagai bagian pengawasan. Namun, ia menjelaskan pengawasan ini tidak termasuk proses audit yang menjadi kewenangan inspektorat serta BPK.

Tujuan pengawalan lebih pada agar-sasaran pembangunan tepat, penyerapan anggaran sesuai serta tidak ada pelanggaran hukum serta berbagai insiden yang bisa menganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Misalnya, bila ada yang akan memagar proyek maka polisi bisa turun tangan membantu. Soal ada tidaknya kerugian negara itu, ada BPK yang mengaudit," pungkasnya. **(eko/lha)**